

MENGEJAR LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK: EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN SARANA PERKOTAAN KOTA PEMATANGSIANTAR HINGGA TAHUN 2035

Lersima Sihotang¹, Ummu Harmain^{2*}

^{1,2}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

*Email korespondensi: ummuharmain@gmail.com

ABSTRAK

Ketersediaan sarana perkotaan yang memadai merupakan prasyarat bagi Kota Pematangsiantar dalam menjalankan fungsinya sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara dan pusat pelayanan bagi wilayah hinterland-nya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ketersediaan sarana perkotaan eksisting dan memproyeksikan kebutuhan sarana hingga tahun 2035 berdasarkan pertumbuhan penduduk terbaru. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar tahun 2023–2025 serta data primer hasil observasi lapangan sebagai pembandingan. Tingkat ketersediaan sarana dinilai menggunakan skala pembobotan (baik, cukup, kurang) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 dan SNI 03-1733-2004, sedangkan proyeksi kebutuhan dihitung dengan metode pertumbuhan geometrik (bunga berganda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Pematangsiantar meningkat dari 274.838 jiwa (2023) menjadi 278.320 jiwa (2024) dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,89% per tahun, sehingga penduduk diproyeksikan mencapai sekitar 341.973 jiwa pada tahun 2035, bertambah 63.653 jiwa (22,87%) dari kondisi 2024. Sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan olahraga secara umum berada pada kategori “baik” (bobot 90%–100%), sementara sarana pemerintahan dan pelayanan umum masih berada pada kategori “cukup” (74,55%). Peningkatan jumlah rumah sakit dari 7 unit (2016) menjadi 10 unit dan puskesmas dari 8 menjadi 19 unit pada 2023 mengindikasikan perbaikan pelayanan kesehatan, namun proyeksi penduduk hingga 2035 tetap menuntut penambahan signifikan pada sarana pendidikan dasar-menengah dan sarana pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Pematangsiantar memperbarui basis data sarana perkotaan secara berkala dan mengintegrasikan proyeksi kependudukan terbaru ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kata Kunci: Sarana Perkotaan, Ketersediaan, Proyeksi Penduduk, Kebutuhan Sarana, Pematangsiantar

ABSTRACT

Adequate provision of urban facilities is a prerequisite for Pematangsiantar City to perform its function as the second largest city in North Sumatra Province and the service center for its surrounding hinterland. This study aims to analyze the current level of urban facility availability and to project facility needs up to 2035 based on the latest population growth. A quantitative descriptive approach was employed using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Pematangsiantar City for 2023–2025, supported by primary field-observation data for comparison. The level of facility availability was assessed using a weighted scoring scale (good, adequate, poor) referring to the Minister of Public Works Regulation No. 41/PRT/M/2007 and SNI 03-1733-2004, while facility-needs projections were calculated using the geometric (compound) growth method. The results show that the population of Pematangsiantar City increased from 274,838 (2023) to 278,320 (2024), with an average annual growth rate of 1.89%, so that the population is projected to reach approximately 341,973 by 2035, an increase of 63,653 people (22.87%) from 2024. Educational, health, religious, commercial, and sports facilities are generally in the “good” category (weight of 90%–100%), while government and public-service facilities remain in the “adequate” category (74.55%). The increase in the number



of hospitals from 7 units (2016) to 10 units and health centers (puskesmas) from 8 to 19 units by 2023 indicates improved health services, yet the population projection to 2035 still demands a significant addition of basic-secondary education and government facilities. This study recommends that the Pematangsiantar City Government periodically update its urban facility database and integrate the latest population projections into the revision of the Regional Spatial Plan (RTRW).

Keywords: Urban Facilities, Availability, Population Projection, Facility Needs, Pematangsiantar

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan pengelolaan kewilayahan yang kompleks, terutama pada wilayah perkotaan (Tarigan, 2006). Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat berimplikasi langsung pada meningkatnya permintaan akan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Ketersediaan sarana perkotaan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk kerap memunculkan kesenjangan pelayanan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan (Saputri & Pratikno, 2024). Fenomena ini sejalan dengan konsep deret hitung-deret ukur, di mana penyediaan sarana perkotaan pada umumnya bergerak lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kebutuhan masyarakat yang meningkat secara eksponensial.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota otonom di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 79,971 km², menjadikannya kota terbesar kedua setelah Kota Medan. Sejak periode otonomi daerah, Kota Pematangsiantar telah mengalami dua kali pemekaran wilayah administratif, dari semula 4 kecamatan menjadi 6, dan terakhir menjadi 8 kecamatan pada tahun 2007, sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Sebagai kota yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat pelayanan primer bagi wilayah hinterland dan pusat pelayanan komplementer bagi penduduknya sendiri, Kota Pematangsiantar dituntut menyediakan sarana perkotaan yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tercatat 274.838 jiwa pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 278.320 jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (CAGR) lima tahun terakhir sebesar 1,89% per tahun (BPS Kota Pematangsiantar, 2024, 2025a). Struktur penduduk didominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebesar 67,92%, yang mengindikasikan tingginya potensi bonus demografi sekaligus tingginya tekanan terhadap kebutuhan sarana pelayanan dasar. Pertumbuhan penduduk yang konsisten ini menjadikan evaluasi berkala terhadap ketersediaan dan kebutuhan sarana perkotaan sebagai sebuah keharusan.

Studi-studi sebelumnya mengenai ketersediaan sarana perkotaan di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Kotamobagu (Rumengan et al., 2019), Kecamatan Selong (Alwi et al., 2019), Kecamatan Nambo (Sadarudin et al., 2023), maupun pada tingkat sekolah dasar (Saputri & Pratikno, 2024), secara konsisten menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sarana masih menjadi masalah struktural pada banyak kota dan kabupaten di Indonesia. Namun demikian, kajian yang secara khusus memperbarui analisis kebutuhan sarana perkotaan Kota Pematangsiantar dengan basis data kependudukan terkini (2024–2025) masih terbatas, sementara kajian terdahulu umumnya menggunakan basis data tahun 2015–2016. Dalam kurun waktu hampir satu dekade, terjadi perubahan signifikan pada struktur



kependudukan dan jumlah sarana pelayanan, terutama pada sektor kesehatan, yang tercatat meningkat dari 7 rumah sakit dan 8 puskesmas pada 2016 menjadi 10 rumah sakit dan 19 puskesmas pada 2023 (BPS Kota Pematangsiantar, 2024).

Kesenjangan riset (research gap) inilah yang mendasari perlunya pembaruan kajian mengenai tingkat ketersediaan dan proyeksi kebutuhan sarana perkotaan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat ketersediaan sarana perkotaan eksisting di Kota Pematangsiantar berdasarkan standar teknis yang berlaku; dan (2) memproyeksikan kebutuhan sarana perkotaan hingga tahun 2035 berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk terbaru. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merumuskan kebijakan penyediaan sarana perkotaan yang lebih responsif terhadap dinamika kependudukan, sekaligus memperkaya khazanah kajian perencanaan wilayah dan kota berbasis data mutakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan kondisi ketersediaan sarana perkotaan secara sistematis dan mengukur proyeksi kebutuhannya secara terukur. Lokasi penelitian adalah wilayah administrasi Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri atas 8 kecamatan, yaitu Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Utara, Siantar Timur, Siantar Martoba, dan Siantar Sitalasari.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri atas data kualitatif (kondisi fisik, sebaran, dan karakteristik sarana) dan data kuantitatif (jumlah penduduk dan jumlah unit sarana). Sumber data terdiri atas data primer, yaitu hasil observasi dan inventarisasi lapangan terhadap sebaran serta kondisi sarana perkotaan, dan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar, meliputi Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2025, Statistik Daerah Kota Pematangsiantar 2024, dan Village Potential Statistics of Pematangsiantar Municipality 2024, serta dokumen perencanaan daerah terkait. Data historis tahun 2016 dari kajian terdahulu digunakan sebagai baseline pembandingan untuk melihat tren perubahan sarana dan kependudukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut.

a. Analisis Tingkat Ketersediaan Sarana Perkotaan

Tingkat ketersediaan dinilai dengan memberikan bobot pada setiap jenis sarana berdasarkan persentase pemenuhan terhadap standar kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Kategori penilaian ditetapkan sebagai berikut: kategori “Baik” diberi bobot 5 apabila tingkat ketersediaan mencapai 75%–100%; kategori “Cukup” diberi bobot 3 apabila tingkat ketersediaan berada pada 50%–74%; dan kategori “Kurang” diberi bobot 1 apabila tingkat ketersediaan di bawah 50%.

b. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Perkotaan



Proyeksi jumlah penduduk dihitung menggunakan metode pertumbuhan geometrik (bunga berganda) dengan persamaan berikut.

$$r = \left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \text{ dan } P_n = P_0 (1 + r)^n$$

di mana P_n adalah jumlah penduduk pada tahun proyeksi, P_0 adalah jumlah penduduk pada tahun dasar, r adalah laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun, dan n adalah selisih tahun proyeksi dengan tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2024 ($P_0 = 278.320$ jiwa) dengan tahun proyeksi 2035 ($n = 11$ tahun), menggunakan laju pertumbuhan rata-rata (CAGR) lima tahun terakhir sebesar 1,89% per tahun berdasarkan publikasi BPS Kota Pematangsiantar (2024). Hasil proyeksi penduduk selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan sarana perkotaan pada masing-masing bidang pelayanan, mengacu pada standar jumlah penduduk pendukung setiap jenis sarana dalam SNI 03-1733-2004.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Pematangsiantar terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 79,971 km² dan terbagi menjadi 8 kecamatan. Dalam rentang waktu 1986–2007, Kota Pematangsiantar mengalami dua kali pemekaran wilayah kecamatan, dari semula 4 kecamatan menjadi 6, dan terakhir menjadi 8 kecamatan melalui serangkaian Peraturan Daerah tahun 2007. Fungsi Kota Pematangsiantar sebagai sentra pusat pemerintahan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya (hinterland) menuntut ketersediaan sarana perkotaan yang lengkap dan merata di seluruh kecamatan

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar 2015–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan/Sumber
2015	247.411	Basis proyeksi kajian terdahulu (2017)
2023	274.838	BPS Kota Pematangsiantar (2024)
2024	278.320	BPS Kota Pematangsiantar (2025a)
CAGR 5 tahun terakhir	1,89% / tahun	BPS Kota Pematangsiantar (2024)

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar (2024, 2025a), diolah.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015 sebesar 247.411 jiwa yang menjadi basis proyeksi pada kajian terdahulu, jumlah penduduk pada 2024 telah bertambah 30.909 jiwa (12,49%) dalam kurun sembilan tahun. Kecamatan Siantar Martoba tercatat sebagai kecamatan dengan proporsi penduduk terbesar (19,18%), diikuti Siantar Utara (18,30%), sementara Siantar Selatan memiliki proporsi penduduk terendah (6,40%) (BPS Kota Pematangsiantar, 2024). Sebaran penduduk yang tidak merata antarkecamatan ini menjadi pertimbangan penting dalam pendistribusian sarana perkotaan agar tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Kondisi Eksisting Sarana Perkotaan

Data eksisting menunjukkan sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Kota Pematangsiantar terdiri atas kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor kepolisian sektor, koramil, kantor pos, balai pertemuan, balai karya, kantor pemadam kebakaran, dan kantor



urusan agama yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada sektor pendidikan tercatat 37 unit TK/PAUD, 169 unit SD/MI, 50 unit SLTP/MTs, 36 unit SLTA/MA, 35 unit SMK, serta 8 akademi, 7 sekolah tinggi, dan 2 universitas, dengan konsentrasi tertinggi pada jenjang SD/MI di Kecamatan Siantar Utara dan jenjang TK/PAUD di Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Timur.

Tabel 2. Kondisi Eksisting Sarana Perkotaan Kota Pematangsiantar per Bidang Pelayanan

No	Bidang Pelayanan	Jenis Sarana Utama	Jumlah (unit)
1	Pemerintahan & Pelayanan Umum	Kantor kecamatan, kelurahan, polsek, koramil, kantor pos, balai pertemuan, balai karya, KUA, damkar	± 82
2	Pendidikan	TK/PAUD, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, SMK, Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas	344
3	Kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, pustu, klinik/balai pengobatan, posyandu	317
4	Peribadatan	Mesjid, musholla, gereja, kuil, vihara	337
5	Perdagangan & Jasa	Pasar, warung, toko, minimarket, plaza/department store	549
6	Olahraga	Lapangan/lokasi olahraga	7

Sumber: Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2016; hasil observasi lapangan; dimutakhirkan pada sektor kesehatan dengan BPS Kota Pematangsiantar (2024). Jumlah pada bidang kesehatan mengikuti data terbaru (lihat Tabel 3).

Perubahan paling signifikan terjadi pada sektor kesehatan. Apabila pada tahun 2016 tercatat 7 rumah sakit, 8 puskesmas, 19 puskesmas pembantu, 35 balai pengobatan umum, dan 250 posyandu, maka pada tahun 2023 jumlah rumah sakit meningkat menjadi 10 unit, puskesmas menjadi 19 unit, puskesmas pembantu 8 unit, klinik 31 unit, dan posyandu sedikit menurun menjadi 249 unit (BPS Kota Pematangsiantar, 2024).

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Sarana Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2016 dan 2023

Jenis Sarana Kesehatan	2016 (unit)	2023 (unit)	Perubahan
Rumah Sakit	7	10	+3 (+42,9%)
Puskesmas	8	19	+11 (+137,5%)
Puskesmas Pembantu (Pustu)	19	8	-11 (-57,9%)
Klinik/Balai Pengobatan	35	31	-4 (-11,4%)
Posyandu	250	249	-1 (-0,4%)

Sumber: Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2016; BPS Kota Pematangsiantar (2024), diolah.

Peningkatan jumlah rumah sakit dan puskesmas hampir dua kali lipat dalam kurun tujuh tahun mengindikasikan perbaikan signifikan pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kota Pematangsiantar dari 74,27 tahun (2022) menjadi 74,75 tahun (2023). Penurunan jumlah puskesmas pembantu diduga terkait dengan konsolidasi dan peningkatan status sebagian pustu menjadi puskesmas penuh.

Pada sektor peribadatan, sarana yang teridentifikasi meliputi 110 unit mesjid, 49 unit musholla, 169 unit gereja, 8 unit vihara, dan 1 unit kuil, yang mencerminkan keragaman komposisi keagamaan masyarakat Kota Pematangsiantar. Sarana perdagangan terdiri atas 6 unit pasar tradisional, 238 warung, 259 toko, 43 minimarket, dan 3 plaza/department store, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Siantar Barat sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa kota. Sarana olahraga tercatat sebanyak 7 lokasi yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tingkat Ketersediaan Sarana Perkotaan



Hasil pembobotan terhadap tingkat ketersediaan sarana perkotaan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Ketersediaan Sarana Perkotaan Kota Pematangsiantar berdasarkan Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan	Bobot Ketersediaan (%)	Kategori
Pemerintahan & Pelayanan Umum	74,55	Cukup
Pendidikan	95,00	Baik
Kesehatan	100,00	Baik
Peribadatan	92,00	Baik
Perdagangan	90,00	Baik
Olahraga	100,00	Baik

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder, mengacu pada Permen PU No. 41/PRT/M/2007 dan SNI 03-1733-2004.

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa sarana pendidikan (95%), kesehatan (100%), peribadatan (92%), perdagangan (90%), dan olahraga (100%) berada pada kategori “Baik”, sementara sarana pemerintahan dan pelayanan umum berada pada kategori “Cukup” dengan bobot 74,55%. Kategori “Cukup” pada sarana pemerintahan mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitas sarana tersebut telah tersedia di setiap kecamatan, distribusinya belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh kelurahan, khususnya untuk sarana pelayanan seperti kantor pos, kantor koramil, dan balai karya yang jumlahnya masih terbatas dibandingkan jumlah kecamatan dan kelurahan yang harus dilayani.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rumengan et al. (2019) di Kotamobagu dan Sadarudin et al. (2023) di Kecamatan Nambo, yang juga menemukan bahwa sarana pemerintahan dan pelayanan umum cenderung menjadi sektor dengan tingkat ketersediaan terendah dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan, karena pembangunannya sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah dan pusat, berbeda dengan sarana perdagangan yang pertumbuhannya lebih banyak didorong oleh mekanisme pasar dan investasi swasta.

Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Sarana hingga Tahun 2035

Berdasarkan data dasar tahun 2024 ($P_0 = 278.320$ jiwa) dan laju pertumbuhan rata-rata $r = 1,89\%$ per tahun, hasil perhitungan proyeksi penduduk Kota Pematangsiantar untuk tahun 2035 ($n = 11$ tahun) adalah sebagai berikut.

$$P_n = 278.320 \times (1 + 0,0189)^{11} = 341.973 \text{ jiwa}$$

Angka ini menunjukkan penambahan penduduk sebesar 63.653 jiwa atau tumbuh 22,87% dari kondisi tahun 2024 dalam kurun 11 tahun ke depan (Tabel 5).

Tabel 5. Perbandingan Proyeksi Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2035: Basis Data Lama vs. Pemutakhiran

Basis Proyeksi	P_0 (jiwa)	r (%/tahun)	n (tahun)	P_n 2035 (jiwa)	Pertambahan (jiwa / %)
Basis 2015 (kajian terdahulu)	247.411	1,09	20	301.888	54.477 / 22,02%
Basis 2024 (pemutakhiran)	278.320	1,89	11	341.973	63.653 / 22,87%

Sumber: Kajian terdahulu (2017); hasil perhitungan ulang penulis berdasarkan BPS Kota Pematangsiantar (2024, 2025a).

Apabila dibandingkan dengan proyeksi pada kajian terdahulu yang menggunakan basis data tahun 2015 ($r = 1,09\%$) dan memproyeksikan penduduk 2035 sebesar 301.888 jiwa, hasil pemutakhiran data menunjukkan proyeksi yang lebih tinggi sekitar 40.085 jiwa (13,3%). Perbedaan ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk riil Kota Pematangsiantar dalam lima tahun terakhir (1,89%) ternyata lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan historis yang



digunakan pada kajian sebelumnya (1,09%), sehingga proyeksi kebutuhan sarana yang disusun berdasarkan data lama berpotensi mengalami underestimasi terhadap kebutuhan riil di masa mendatang.

Konsekuensi dari pemutakhiran proyeksi penduduk ini adalah perlunya penyesuaian target penambahan sarana perkotaan yang telah disusun dalam kajian terdahulu. Estimasi kebutuhan tambahan sarana pendidikan berdasarkan proyeksi lama, misalnya penambahan 46 unit TK, 2 unit SLTP, 15 unit SLTA, dan 8 unit SMK hingga tahun 2035, perlu direvisi secara proporsional mengikuti selisih proyeksi penduduk yang lebih besar ($\pm 13,3\%$), sehingga kebutuhan riil kemungkinan lebih tinggi dari estimasi tersebut, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang paling sensitif terhadap pertumbuhan penduduk usia muda.

Pada sektor kesehatan, pertumbuhan jumlah rumah sakit dan puskesmas yang telah terjadi antara 2016–2023 (peningkatan lebih dari 100% pada kedua jenis sarana) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar secara aktif merespons kebutuhan pelayanan kesehatan, bahkan melampaui laju pertumbuhan penduduk pada periode yang sama. Namun demikian, pertumbuhan penduduk hingga 2035 tetap membutuhkan penambahan puskesmas pembantu dan balai pengobatan pada kecamatan pinggiran yang mengalami pertumbuhan penduduk lebih pesat, seperti Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari sebagai hasil pemekaran wilayah.

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum, yang berada pada kategori “Cukup” (74,55%), memerlukan prioritas penambahan tertinggi mengingat statusnya sebagai sektor dengan skor ketersediaan terendah sekaligus terkait langsung dengan fungsi Kota Pematangsiantar sebagai sentra pusat pemerintahan. Penambahan idealnya diarahkan pada kecamatan hasil pemekaran yang belum memiliki kelengkapan sarana pelayanan setara kecamatan induk, sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Temuan ini memperkuat pentingnya evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan tata ruang, sebagaimana disarankan oleh Alwi et al. (2019) dan Saputri & Pratikno (2024), bahwa proyeksi kebutuhan sarana yang disusun berdasarkan data kependudukan yang telah usang berisiko menghasilkan perencanaan yang tidak responsif terhadap dinamika pertumbuhan penduduk aktual, terutama pada kota-kota dengan laju urbanisasi yang cenderung meningkat seperti Kota Pematangsiantar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, tingkat ketersediaan sarana perkotaan di Kota Pematangsiantar secara umum berada pada kategori “Baik” untuk sektor pendidikan (95%), kesehatan (100%), peribadatan (92%), perdagangan (90%), dan olahraga (100%), sementara sarana pemerintahan dan pelayanan umum masih berada pada kategori “Cukup” (74,55%) dan memerlukan prioritas penambahan. Kedua, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar meningkat dari 274.838 jiwa (2023) menjadi 278.320 jiwa (2024) dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,89% per tahun, sehingga diproyeksikan mencapai 341.973 jiwa pada tahun 2035, meningkat 22,87% dari kondisi 2024. Ketiga, pemutakhiran data kependudukan menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan sarana yang disusun berdasarkan data



historis (2015–2016) berpotensi underestimasi terhadap kebutuhan riil, sehingga diperlukan penambahan sarana yang lebih besar dari estimasi sebelumnya, terutama pada sektor pendidikan dasar-menengah dan sarana pemerintahan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Pematangsiantar: (1) memperbarui basis data inventarisasi sarana perkotaan secara berkala, minimal setiap lima tahun, sejalan dengan periode revisi RTRW; (2) memprioritaskan penambahan sarana pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan hasil pemekaran yang belum memiliki kelengkapan pelayanan setara kecamatan induk; dan (3) mengintegrasikan proyeksi pertumbuhan penduduk terbaru berbasis data BPS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan RTRW guna menghindari kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan sarana perkotaan pada masa mendatang. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan analisis spasial guna mengetahui pola distribusi dan radius pelayanan sarana secara lebih presisi

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006a). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2006b). *Teori-Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alwi, M., Pranata, A., & Karismawan, P. (2019). Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Selong sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonobis*, 5(1), 1–17.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2016). *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2016*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2024). *Statistik Daerah Kota Pematangsiantar 2024*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2025a). *Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2025*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. (2025b). *Village Potential Statistics of Pematangsiantar Municipality 2024*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). *SNI 03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Budiharjo, E., & Sujarto, D. (1997). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Handayani, A. D., & Yulianti, N. (2014). Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pudukpayung. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 2(3), 231–240.
- Jayadinata, J. T. (1992). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam



- Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rumengan, M. R. C., Kindangen, J., & Takumansang, E. (2019). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Sosial di Kotamobagu. *Jurnal Spasial*, 6(2), 375–387.
- Sadarudin, M., Geo, L. O., & Syaf, H. (2023). Analisis Kebutuhan Sarana di Kecamatan Nambo. *Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 8(2), 128–138.
- Saputri, R. D. R., & Pratikno, A. S. (2024). Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(2), 340–347. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.481>
- Sihombing, J., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 54-69
- Sihotang, Lersima. (2017). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Perkotaan Di Kota Pematangsiantar Sebagai Pusat Pelayanan Wilayah. Tesis Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Simalungun (unpublished).
- Sinulingga, B. D. (1999). Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tarigan, R. (2006). Perencanaan Pembangunan Wilayah (Cet. II). Jakarta: Bumi Aksara.

